

## **Kajian Status Gizi dalam Perspektif Pengembangan Wilayah Kabupaten Bekasi**

<sup>1</sup>Anisa, <sup>2</sup>Ina Helena Agustina

<sup>1,2</sup>*Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>anisanuddin808@gmail.com, <sup>2</sup>inahelena66@gmail.com*

**Abstract.** Bekasi Regency development is only focused on industrial estates, the unevenness of the government's attention to 23 sub-districts in Bekasi has become a major problem such as the distribution of food to remote areas of Bekasi causing the emergence of malnutrition. This shows the existence of GAP between the issue of Bekasi regency issues and the Sustainable Development Goals. Bekasi has regional income that is large, compared to all districts in West Java, but the achievement was not able to overcome the problem of nutritional status in Bekasi Regency. this was verified by the Bekasi Regency Research and Development Office with the implementation of a study on the prevention of community nutrition problems in 2017. This research was conducted to determine the nutritional status of the community in the area in Bekasi. This study uses an approach method with four regional parameters, namely road network conditions, the effect of the conversion of agricultural land towards fulfilling self-sufficiency in rice, environment sanitation and meeting the needs of health center facilities. own measurement of Nutritional status seen from the parameters of IMT Analysis and LILA. The results of this study are where the development areas I and III have nutritional status "good", while the development area II has a "less" nutritional status and the development area IV has a "bad" nutritional status, This illustrates the uneven quality of human resources in Bekasi Regency. he conclusion of this study is that uneven nutritional status is influenced by the territorial factors of Bekasi district.

**Keywords:** Area Of Development, Nutritional Status, Regional Parameters

**Abstrak.** Pembangunan Kabupaten Bekasi hanya terfokus pada kawasan industri, ketidak merataannya perhatian pemerintah ke 23 kecamatan di kabupaten bekasi menjadi permasalahan utama seperti pendistribusian pangan ke pelosok kabupaten bekasi menyebabkan munculnya gizi buruk, hal ini menunjukkan adanya GAP antara isu permasalahan kabupaten Bekasi dengan Sustainable Development Goals. Bekasi memiliki pendapatan asli daerah yang termasuk besar jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten di Jawabarat, namun pencapaian tersebut tidak mampu mengatasi masalah status gizi di Kabupaten Bekasi. hal ini diverifikasi oleh Dinas Penelitian dan pengembangan Kabupaten Bekasi dengan dilaksanakannya Kajian penanggulangan masalah gizi masyarakat ditahun 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status gizi masyarkat dalam perwilayahan dikabupaten bekasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan empat parameter perwilayahan yaitu Kondisi jaringan jalan, pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap pemenuhan swasembada beras, sanitasi lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan sarana puskesmas. Untuk pengukurannya sendiri status Gizi dilihat dari parameter Analisis indeks massa tubuh, analisis lingkaran lengan. Adapun hasil dari penelitian ini dimana wilayah pengembangan I dan III memiliki status gizi "baik", sedangkan wilayah pengembangan II memiliki status gizi "kurang" dan wilayah pengembangan IV memiliki status gizi "buruk", hal ini menggambarkan kualitas SDM di Kabupaten Bekasi tidak merata. Kesimpulan dari penelitian ini ialah status gizi yang tidak merata dipengaruhi oleh faktor-faktor kewilayahan kabupaten Bekasi..

**Kata Kunci:** Pengembanganwilayah, Status Gizi, Parameter-Perwilayahan

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar Belakang**

*Sustainable Development Goals* atau biasa disingkat dengan SDGs merupakan kebijakan dunia yang berisi tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas 17 point dengan 169 target yang akan dicapai, tujuan ini telah ditentukan oleh

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai agenda dunia mengenai pembangunan baik secara fisik maupun mental. Salah satu amanat SDGs yang disoroti ialah permasalahan gizi dimana melibatkan beberapa permasalahan wilayah seperti melipat-gandakan produksi pangan, memenuhi akses yang aman untuk pendistribusian pangan serta produksi pangan, serta

mengakhiri bentuk malnutrein (Gizi Buruk).

Pada tahun 2017 Dinas Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan kajian mengenai kondisi status gizi, berdasarkan hasil laporan tersebut menunjukkan adanya indikasi permasalahan gizi di Kabupaten Bekasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan target SDG yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi (Status gizi buruk). Menurut Unicef dalam Marzina (2010) kondisi status gizi seseorang mempengaruhi Tingkat Perkembangan IQ, sedangkan IQ sendiri menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia untuk pembangunan lebih baik.

Selain itu Kabupaten Bekasi telah melaksanakan beberap kajian alih fungsi lahan pertanian terhadap swasembada beras di Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Robbinov D. A pada tahun 2015, kajian tersebut berkaitan dengan isu pengembangan wilayah Kabupaten Bekasi yang dirilis artikel Media Tata Ruang “Gelar Cikarang sebagai Kota industri terbesar di asia tenggara telah menjadi peluang bagi investor untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya di Cikarang”. Artinya dari pengembangan Kabupaten Bekasi hanya terkonsentrasi pada kawasan industri yaitu Cikarang, hal ini menunjukkan adanya persoalan pembangunan di Kabupaten Bekasi seperti persoalan akses pangan tidak merata di 23 kecamatan di seluruh Kabupaten Bekasi, persoalan ketidakmerataan distribusi pangan yang menunjukkan adanya indikasi permasalahan status gizi di Kabupaten Bekasi. Hasil tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan sedangkan Kabupaten Bekasi menunjukkan angka pendapatan asli daerah (PAD) Sebesar 4.9 Triliun ditahun 2017, Namun angka PAD

tersebut masih belum bisa membenahi permasalahan yang kompleks di Kabupaten Bekasi.

Problematika gizi terkait permasalahan wilayah inilah yang perlu diprioritaskan oleh Kabupaten Bekasi untuk memenuhi SDGs pada poin kedua serta menunjang visi pembangunan Kabupaten Bekasi yaitu “**Produktif**, menandung pengertian bahwa kualitas dan kuantitas kerja masyarakat Kabupaten Bekasi semakin meningkat dalam upaya mewujudkan pilar utama peningkatan perekonomian daerah”.

### Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji ialah, Bagaimana status gizi terhadap perwilayah Kabupaten Bekasi?

### Tujuan Penelitian

Kajian Ini dilakukan dengan tujuan yaitu mengetahui status gizi masyarakat dalam perwilayahan Kabupaten Bekasi.

### B. Landasan Teori

Dijelaskan pada Tabel 1 di halaman berikutnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun kaitan antara permasalahan wilayah Kabupaten Bekasi dengan Status gizi perwilayah ialah :

1. Wilayah Pengembangan I  
Berikut klasifikasi dari berbagai parameter kajian ini yaitu:
  - a. Wilayah pengembangan I ini jika dilihat dari kondisi dari sebaran jaringan jalan memiliki kondisi yang baik hal ini mempengaruhi distribusi beras keseluruhan wilayah pengembangan I

**Tabel 1.** Landasan Teori

| No. | Judul  | Nama Peneliti                                     | Tahun | State of the art  |
|-----|--|---|-------|---|
| 1   | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan   | UNDP ( <i>United Nation Development Program</i> ) | 2015  | Dalam SDG's terdiri atas 17 turjuan pembangunan secara berkelanjutan, salah satunya ialah Pemenuhan Gizi: dengan target Akses aman dan merata, peningkatan produktivitas dan produksi pangan.   |
| 2   | Kajian Alih fungsi lahan pertanian terhadap swasembada beras di kabupaten bekasi | Robbinov Dwi Ardi                                 | 2015  | laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi sebesar 1.13 % atau 46.56 Ha, sedangkan Kab. Bekasi sendiri sudah mengalami defisit swasembada berat sebesar 299,912.83 ton. berdasarkan Rencana tata ruang RTRW Kab. Bekasi 2011-2031 akan mengmpluas alih fungsi lahan pertanian maka angka defisit ini akan semakin besar |
| 4   | Peraturan Kesehatan Lingkungan   | Dinas Kesehatan RI                                |       | Kondisi Air Bersih ( berwarna, berbau, keruh)<br>Kepemilikan kamarmandi dan septiktank; pengolahan sampah;  |
| 5   | Standar tatacara penataan ruang  |   |       | Strandar pembangunan puskesmas baik luasan dan standar berdasarkan jumlah penduduk.   |
| 6   | FAKTOR PEMBANGUNAN WILAYAH TERHADAP STATUS GIZI BALITA DI INDONESIA              | N.A. Ma'ruf, Dwi Hapsari, Ika Dharmayanti         | 2016  | Suatu wilayah memerlukan fasilitas kesehatan berhubungan dengan status gizi balita, jika dilihat dari sisi masyarakatnya perlu adanya jaminan pelayanan kesehatan, dan pengetahuan ketersediaan   |
| 7   | Paradigma pembangunan berbasis Sumberdaya Manusia                                | UNDP ( <i>United Nation Development Program</i> ) |       | Berdasarkan pembangunan yang melihat kualitas msumberdaya masyarakat memiliki indikator kualitas sumberdaya manusia:<br>1. Pendapatan<br>2. Pendidikan<br>3. Kesehatan  |
| 8   | Peraturan Tentang Status Gizi  | Dinas Kesehatan RI                                |       | Lingkar lengan atas dan Indeks Massa tubuh  |

b. WP I ini tidak memiliki kemampuan untuk survive dengan memproduksi beras sendiri dilihat dari tingginya laju alih fungsi lahan pertanian kearah non-pertanian, hal ini didukung

dengan arahan RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031 dimana fungsi pengembangan WP I ialah kawasan industri dan perdangan.

c. Jika dilihat dari sisi sanitasi

- lingkungan WP I termasuk kedalam kondisi sanitasi lingkungan “sedang” dimana Pengolahan sampah dan drainase belum memadai sehingga hal ini menimbulkan dampak terjangkit pengakit diare dan DBD, kualitas air bersih menurun dan kualitas air sungai menurun.
- d. Sedangkan untuk kelengkapan sarana kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk baik dan mampu melayani masyarakat saat ini.
  - e. Keempat parameter tersebut berkaitan dengan status gizi di WP I dimana klasifikasi tersebut termasuk kedalam klasifikasi normal, hal ini menunjukkan kualitas SDM di WP I berpotensi baik dan mampu mencapai tujuan SDGs poin ke-dua.
2. Wilayah Pengembangan II  
Berikut klasifikasi dari berbagai parameter kajian ini yaitu:
- a. Wilayah pengembangan II ini jika dilihat dari kondisi dari sebaran jaringan jalan memiliki kondisi yang baik hal ini mempengaruhi distribusi beras keseluruhan wilayah pengembangan II,
  - b. WP II ini cukup mampu untuk survive dengan memproduksi beras sendiri dilihat dari tingginya laju alih fungsi lahan pertanian kearah non-pertanian, hal ini didukung dengan arahan RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031 dimana fungsi pengembangan WP II ialah kawasan industri, permukiman dan pertanian perkebunan,
  - c. Jika dilihat dari sisi sanitasi lingkungan WP II termasuk kedalam kondisi sanitasi lingkungan “Buruk” dimana wilayah II belum mendapatkan layanan pengolahan sampah dan drainase belum memadai sehingga hal ini menimbulkan dampak terjangkit pengakit diare dan DBD, kualitas air bersih menurun dan kualitas air sungai menurun.
  - d. Sedangkan untuk kelengkapan sarana kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk buruk dan hal ini mengindikasi Puskesmas kurang mampu melayani masyarakat saat ini.
  - e. Keempat parameter tersebut berkaitan dengan status gizi di WP II dimana klasifikasi tersebut termasuk kedalam klasifikasi kurang, hal ini menunjukkan kualitas SDM di WP II berpotensi kearah baik dan cukup mampu mencapai tujuan SDGs poin ke-dua.
3. Wilayah Pengembangan III  
Berikut klasifikasi dari berbagai parameter kajian ini yaitu:
- a. Wilayah pengembangan III ini jika dilihat dari kondisi dari sebaran jaringan jalan memiliki kondisi yang sedang hal ini mempengaruhi distribusi beras keseluruhan wilayah pengembangan III,
  - b. WP III ini tidak mampu untuk survive dengan memproduksi beras sendiri dilihat dari tingginya laju alih fungsi lahan pertanian kearah non-pertanian, hal

- ini mengindikasikan adanya masalah pengembangan wilayah dilihat dari arahan RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031 dimana fungsi pengembangan WP III ialah kawasan pertanian lahan basah.
- c. Jika dilihat dari sisi sanitasi lingkungan WP III termasuk kedalam kondisi sanitasi lingkungan “Buruk” dimana wilayah III belum mendapatkan layanan pengolahan sampah dan drainase belum memadai sehingga hal ini menimbulkan dampak terjangkit pengakit diare dan DBD, kualitas air bersih menurun dan kualitas air sungai menurun,
  - d. Sedangkan untuk kelengkapan sarana kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk buruk dan hal ini mengindikasikan Puskesmas kurang mampu melayani masyarakat saat ini.
  - e. Keempat parameter tersebut berkaitan dengan status gizi di WP III dimana klasifikasi tersebut termasuk kedalam klasifikasi Normal, hal ini menunjukkan kualitas SDM di WP III berpotensi baik dan mampu mencapai tujuan SDGs poin ke-dua.
4. Wilayah Pengembangan IV  
Berikut klasifikasi dari berbagai parameter kajian ini yaitu:
- a. Wilayah pengembangan IV ini jika dilihat dari kondisi dari sebaran jaringan jalan memiliki kondisi yang buruk hal ini mempengaruhi distribusi beras keseluruhan wilayah pengembangan IV,
  - b. WP IV ini kurang mampu untuk *survive* dengan memproduksi beras sendiri dilihat dari tingginya laju alih fungsi lahan pertanian kearah non-pertanian, hal ini mengindikasikan adanya masalah pengembangan wilayah dilihat dari arahan RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031 dimana fungsi pengembangan WP IV ialah kawasan pertanian lahan basah.
  - c. Jika dilihat dari sisi sanitasi lingkungan WP IV termasuk kedalam kondisi sanitasi lingkungan “Buruk” dimana wilayah IV belum mendapatkan layanan pengolahan sampah dan drainase belum memadai sehingga hal ini menimbulkan dampak terjangkit pengakit diare dan DBD, kualitas air bersih menurun dan kualitas air sungai menurun.
  - d. Sedangkan untuk kelengkapan sarana kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk buruk dan hal ini mengindikasikan Puskesmas kurang mampu melayani masyarakat saat ini
  - e. Keempat parameter tersebut berkaitan dengan status gizi di WP IV dimana klasifikasi tersebut termasuk kedalam klasifikasi Buruk, hal ini menunjukkan kualitas SDM di WP IV buruk dan tidak mampu mencapai tujuan SDGs poin ke-dua.

**Tabel 2.** Klasifikasi Permasalahan Wilayah Terhadap Status Gizi

| Wilayah Pengembangan                        | Wilayah Pengembangan I |           | Wilayah Pengembangan II |          | Wilayah Pengembangan III |                      | Wilayah Pengembangan IV |          |
|---|------------------------|-----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
|   |                        |           |                         |          |                          |                      |                         |          |
| Kondisi dari sebaran Jaringan Jalan         | Rendah                 | 3         | Sedang                  | 2        | Rendah                   | 3                    | Tinggi                  | 1        |
| Alih fungsi lahan terhadap swasembada beras | Tinggi                 | 1         | Sedang                  | 2        | Rendah                   | 3                    | Sedang                  | 2        |
| Sanitasi Lingkungan                         | Sedang                 | 2         | Buruk                   | 1        | Buruk                    | 1                    | Buruk                   | 1        |
| Sarana Puskesmas                            | Baik                   | 3         | Buruk                   | 1        | Sedang                   | 2                    | Buruk                   | 1        |
| Satatus Gizi                                | Normal                 | 3         | Kurang                  | 2        | Normal                   | 3                    | Buruk                   | 1        |
| <b>Klasifikasi</b>                          | <b>Baik</b>            | <b>12</b> | <b>Sedang</b>           | <b>8</b> | <b>Baik</b>              | <b>1</b><br><b>1</b> | <b>Buruk</b>            | <b>6</b> |

Sumber: Hasil Analisis, 2019

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimanakah status gizi dalam perwilayahan Kabupaten Bekasi?” menunjukkan adanya persebaran pembangunan yang tidak merata di Kabupaten Bekasi, ketimpangan antara parameter wilayah terhadap status gizi di kabupaten Bekasi, hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yaitu:

1. Wilayah Pengembangan I termasuk kedalam klasifikasi status gizi baik dan menunjukkan parameter alih fungsi lahan pertanian mempengaruhi status gizi tersebut.
2. Wilayah Pengembangan II termasuk kedalam klasifikasi status gizi Kurang dan menunjukkan parameter sanitasi lingkungan dan kebutuhan sarana puskesmas mempengaruhi status gizi tersebut.
3. Wilayah Pengembangan III termasuk kedalam klasifikasi status gizi baik dan

menunjukkan parameter sanitasi lingkungan mempengaruhi status gizi tersebut.

4. Wilayah Pengembangan IV termasuk kedalam klasifikasi status gizi “Buruk” dan menunjukkan parameter kualitas jaringan jalan, sanitasi lingkungan dan kebutuhan sarana Puskesmas mempengaruhi status gizi tersebut.

#### E. Saran

hasil penelitian ini mampu menunjukkan bahwa adanya persoalan dalam sisi kewilayahan yang menyangkut ketidak-merataan status gizi diperwilayahan Kabupaten Bekasi, hasil penelitian ini perlu di tindak-lanjuti lewat strategi-strategi yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini startegi yang dimaksud yaitu:

1. Wilayah Pengembangan I memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan beras dengan cara memberikan akses jalan keseluruh wilayah pengembangan I agar distribusi

- beras dari wilayah luar ke pelosok Kabupaten Bekasi, serta membenahi layanan pengelolaan sampah di WP I.
2. Wilayah Pengembangan II memerlukan adanya pemenuhan kebutuhan beras dengan cara memberikan akses jalan keseluruh wilayah pengembangan II agar distribusi beras dari wilayah luar ke pelosok Kabupaten Bekasi, serta menyediakan layanan pengelolaan sampah di WP II, dan melengkapi sarana kesehatan masyarakat (Puskesmas).
  3. Wilayah Pengembangan III memerlukan adanya pembenahan kondisi jalan dan distribusi jalan ke seluruh area WP III, serta menyediakan layanan pengelolaan sampah di WP III, serta melengkapi sarana kesehatan masyarakat (Puskesmas).
  4. Wilayah Pengembangan IV memerlukan adanya pembenahan kondisi jalan dan menambah distribusi jalan ke seluruh area WP IV, pemenuhan kebutuhan beras dengan cara memberikan akses jalan keseluruh wilayah pengembangan IV agar distribusi beras dari wilayah luar ke pelosok Kabupaten Bekasi, serta menyediakan layanan pengelolaan sampah di WP IV, serta melengkapi sarana kesehatan masyarakat (Puskesmas).
- Aksesilitas Puskesmas di Kabupaten Pringsewu. Universitas Bandar Lampung. 6 Desember 2016. Bandar Lampung.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2018. Inventaris Jaringan Jalan di Kabupaten Bekasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Bekasi.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2018. Pemetaan Sanitasi Drainase dan Persampahan Kabupaten Bekasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kabupaten Bekasi.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2017. Kajian Penanggulangan Masalah Gizi Kabupaten Bekasi. Dinas Kesehatan. Kabupaten Bekasi
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2015. Pembangunan Pertanian Berbasis Ekoregion. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Dewantaru. Yosep, 2018. Pengelompokan Status Gizi Pada Orang Dewasa Menggunakan K-Means Clustering. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Yogyakarta.
- Dinas penelitian dan pengembangan. 2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2013. 1 Desember 2013. Jakarta
- Fuada, Novianti d. 2012. Penentuan Daerah Rawan Gizi Berdasarkan Analisis Spatial. Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat. Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik

### Daftar Pustaka

- Almatsier, S. 2003. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Aryanti, Wanda. 2016. Pemetaan dan

- Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kesehatan dalam Kerangka Sustainable Development Goals. Kementerian Kesehatan RI. 1 Desember 2015. Jakarta
- Marzina, Devi. 2010. Analisis faktor-fakto yang berpengaruh terhadap status gizi balita di pedesaan. 2 September 2010. Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031
- Robbinov, 2015. Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Swasembada Beras Di Kabupaten Bekasi. Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2003. Relevansi Kebijakan *Hiuman-Centered Development* dan Perbaikan Kualitas Pendidikan Dalam Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia. FISIP UNPAR. 1 April 2003. Bandung.
- Soekirman,2000. Ilmu Gizi dan Aplikasinya. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Sopari, Hery. 2014. Paradigma Pembangunan yang Tepat untuk Indonesia.5 Juli 2014. Indonesia.
- Standar Nasional Indonesia Nomor 13-1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
- Undang-Undang Nomor. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. 13 Oktober 2009. Jakarta
- Setiyanto, A., dan B. Irawan. 2013. Pembangunan Berbasis Wilayah: teori, Konsep Oprasional dan Implementasi Pada Sektor Pertanian.